

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Abdul Kadir dan Joko Poerwono, *Metodologi Penelitian II*, (Surakarta:UNS Press,1988).

Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*,( Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2009).

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan pendaftaran*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2013).

-----, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta:Sinar Gravika, 2012).

Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi : Telaah Filsafat Politik John Rawls*,(Yogyakarta : Kanisius, 2001).

Arie Sukanti Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005).

Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, (Jakarta:Margaretha Pustaka, 2015).

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi Cetakan Kedua belas, (Jakarta : Djambatan, 2008).

-----, *Hukum Agraria Indonesia, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta:Djambatan,2007).

Chulaemi Ahmad, *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak atas Tanah*,(Semarang : FH UNDIP, 1993).

Dr. Mukti fajar ND dan Yulianto Achmad, M.H, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013).

Garry Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Dalam Seri Dasar Hukum*,(Jakarta:UI Pres,2001).

Hasil survey sosial/ penelitian oleh Dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer tentang *Penataan Kembali Data Yuridis Tanah Asset Milik TNI AD yang dikuasai masyarakat/sipil/ Instansi lain untuk pengamanan asset barang milik Negara*, (Baglit LPPM,2016).

Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta :UI Press, 1973).

John Rawls, *A Theory of Justice* ,(London:Oxford University Press,1971 ).

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*,(Surakarta:FH UMS,2004).

Maria SW Sumarjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Cetakan Keenam (Jakarta : Kompas, 2009).

Priyatna Abdulrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002).

Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung:Mandar Maju, 1991).

Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*, (Mataram: Pustaka Reka Cipta, 2012).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Peersada,2001).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, (Jakarta: UI Press,1986).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,(Yogyakarta: Liberty, 2006)

Sujud Margono, *ADR dan Arbitrase"Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum"*, (Bojungkerta:Ghalia Indonesia,2004).

Urip Santoso, *"Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah"*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010).

Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, (Yogyakarta:Thafa Media,2014).

Widyarini Indriastuti Wardani, Joko Panatas dkk, *Hukum Pertanahan*, (Semarang: FH UNTAG,2011).

Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Total Media, 2009).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang – undang No.32 tahun 2004 tentang Pelimpahan Kewenangan yang berkaitan dengan bidang pertanahan kepada pemerintah daerah kabupaten

Undang – undang No.86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi perusahaan milik Belanda, konversi hak barat

Peraturan Pemerintah (PP) No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 tahun 1999 tentang tata cara penanganan sengketa pertanahan, lembaga mediasi , lembaga Negosiasi dan lembaga Alternative Dispute Resolution (ADR)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.3 tahun 2007 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 tahun 1975 tentang ketentuan – ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah

Surat Mentri Dalam Negeri No.H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 tentang penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil oleh pemerintah pendudukan jepang

Surat Edaran Menteri dalam Negeri No.Agr.40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 tentang penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil oleh pemerintah pendudukan jepang

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.593/III/Agr. Tanggal 7 Januari 1983 tentang penyelesaian tanah rakyat yang diambil pemerintah jepang

Bijblad No.12476 tentang pembelian tanah oleh pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 470/PMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan BM/KN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 350/PMK.03 /1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan BM/KN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN

Surat Dirjen Matfasjasa Dephankam Nomor B/780-16/19/22/DJMFJ tanggal 6 Juli 1990 perihal Gedung dan tanah Bekas Sekolah Asing/Cina

Peraturan menteri keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang tanah dan bangunan bekas Asing/ Cina

Peraturan Dirjen Agraria Nomor 3 Tahun 1968 tanggal 9 April 1968 tentang

Pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet dwikora No.5/Prk/tahun 1965

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.262/Pdt.G/2014/PN.Smg.

### **C. Website**

<http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Penanganan-kasus-pertanaha>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Naskah Putusan No.262/Pdt.G/2014/PN.Smg